

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai kelengkapan pengungkapan tata kelola perusahaan di dalam laporan tahunan pada 8 (delapan) perusahaan subsektor pertambangan logam dan mineral dalam 5 (lima) tahun, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil yang diperoleh.

1. Berdasarkan penelitian ini dengan keterbatasan yang telah dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya, menghasilkan 16 kelompok penilaian tata kelola perusahaan dengan total 734. Kelompok penilaian indikator tersebut diperoleh dengan alat ukur berdasarkan berbagai sumber, yaitu (1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (3) Komite Nasional Kebijakan Governance, (4) *Asean Corporate Governance Scorecard*, (5) Sarbanes-Oxley Section 404, (6) ISO 31000:2009, (7) *Australian/New Zealand Standard 4360:2004*, (8) COSO Internal Control Framework, dan (9) COSO Enterprise Risk Management. Indikator-indikator penilaian ini memberikan arti bahwa perusahaan telah menyajikan isi laporan tahunannya sesuai dengan sebagian besar aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perusahaan menghasilkan nilai maksimal sebesar 734 artinya bahwa perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan tahunannya cukup lengkap, tetapi apabila perusahaan menghasilkan nilai kurang dari 734 artinya perusahaan tersebut belum terlalu lengkap dalam menyajikan laporan keuangan tahunannya.
2. Penerapan indikator penilaian tata kelola perusahaan pada delapan perusahaan subsektor pertambangan logam dan mineral selama lima tahun sebagian besar sudah menyajikan informasi tata kelola perusahaan dengan cukup baik tetapi masih menyajikan informasi secara formalitas. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT Citra Kebun Raya Agri Tbk, PT Central Omega Resources, dan PT J Resources Asia Pasifik. Namun untuk PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Timah Tbk sudah menyajikan informasi tata kelola

perusahaan di dalam laporan tahunannya dengan cukup lengkap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

3. Pada hasil persentase rata-rata untuk seluruh indikator tata kelola perusahaan pada setiap 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral yang tertinggi yaitu dimiliki PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) karena perusahaan ANTM merupakan perusahaan BUMN sehingga memiliki aturan tersendiri terkait tata kelola perusahaan dan ANTM memiliki total aset terbesar diantara 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral dimana total aset semakin tinggi maka kapabilitas perusahaan juga semakin meningkat. Sedangkan persentase rata-rata terendah terdapat pada 2 (dua) perusahaan, yaitu untuk tahun 2012 – 2014 pada PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) yang merupakan perusahaan asing dan memiliki total aset terkecil ke-4 dari 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral dan untuk tahun 2015 – 2016 pada PT SMR Utama Tbk. (SMRU) yang merupakan perusahaan BUMN serta memiliki total aset terkecil ke-3 dari 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari persentase rata-rata 16 indikator penilaian tata kelola perusahaan pada 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan mengungkapkan informasi di dalam laporan tahunannya mengenai komite audit, sekretaris perusahaan, sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, perkara penting, sanksi administratif, dan *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan perusahaan telah menyadari akan pentingnya penyajian informasi tersebut di dalam laporan tahunannya dan adanya aturan baru mengenai peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK yang tercantum di dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana aturan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012. Oleh karena itu perusahaan telah menyesuaikan isi laporan tahunannya dengan aturan-aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun perusahaan masih

diperbolehkan untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun aturan-aturan OJK yang harus disesuaikan oleh perusahaan yaitu POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang berlaku sejak 17 November 2015; POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 8 Desember 2014; POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang berlaku sejak 29 Desember 2015; dan SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 3 Agustus 2016.

Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan di dalam laporan tahunan perusahaan dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengartikan bahwa sebagian besar perusahaan sudah menaati peraturan yang berlaku terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari peneliti antara lain:

1. Untuk Perusahaan

Bagi Perusahaan dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mampu melaksanakan penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kepercayaan publik dan mampu meningkatkan kinerja keuangan dengan lebih baik lagi bagi perusahaan, serta dapat meningkatkan perekonomian Negara.

2. Untuk Investor

Bagi investor dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lebih seksama dan juga memerhatikan aspek tata kelola perusahaan sebagai bahan pertimbangan melakukan investasi dan menilai perusahaan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel ataupun dengan menggunakan sampel pada sektor lain dan juga

disarankan untuk menambah jumlah periode yang digunakan untuk penelitian. Selain itu, disarankan juga menggunakan lebih dari satu sektor perusahaan sehingga dapat dilakukan perbandingan penerapan tata kelola perusahaan dengan sektor yang berbeda.

4. Untuk Regulator

Bagi regulator penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap peraturan yang telah ada dan menjadi dasar pembuatan regulasi yang lebih sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, regulator dapat terus melakukan pengembangan kualitas standar dalam menetapkan peraturan terkait pengungkapan *good corporate governance* di dalam laporan tahunan.

5. Untuk Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance* di dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Academician Investopedia. (n.d.). Disclosure. Retrieved from Investopedia Academy:<https://www.investopedia.com/terms/d/disclosure.asp>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP.(2014). Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>.
- Bhuiyan, M. H. Corporate Governance and Reporting: An Empirical Study of The Listed Companies in Bangladesh. *Journal of Business Studies*, XXVIII.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). Retrieved from www.idx.co.id.
- Cadbury, S. A. (2002). *Corporate Governance: An International View*. Oxford: Oxford University Press.
- Choi, F. Carol Ann Frost dan Gary K Meek. (1999). *Akuntansi Internasional*. Prentice Hall International.
- Forum for Corporate Governance (FCGI). 2002. *Seri Tata Kelola Perusahaan - Corporate Governance (Jilid I, II, & III)*. Edisi 2. Jakarta.
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. dan B. Riyanto. (1997). The Effect of Asymmetrical Information and Risk Attitude on Incentive Schemes: A contingency Approach. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1-12.
- Jensen, M and W. Meckling. (1976, December). *Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3 , 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Moeller, R. R. 2011. Edisi 2. *COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk and Compliance Processes*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Murni, Siti Aisah. (2003, 16-17 Oktober). "*Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost Of Equity Capital Pada Perusahaan Publik di Indonesia*". Simposium Nasional Akuntansi VI.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*.
- Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from www.ojk.go.id.

- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Shim, Joel G Siegel dan Jae K. (1994). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Elexa.
- Suwardjono. (2011). *"Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan"*. BPFE, Edisi 3. Yogyakarta.
- Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal. (2002). *Membangun Good Corporate Governance GCG*. Jakarta: Havarindo.
- Verdiyana, Renita. (2006, Januari). "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan". *Jurnal Akuntansi*, 17-54.
- Widyaningdyah, Agnes Utari. (2001, November). "Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 3, No.2. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.